

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

Aprita S, Hasyim Y. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor : Mitra Wacana Media.

Asshiddiqie J, Safa'at MA. 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Seri Pemikir Hukum). Jakarta : Konstitusi Press.

Atmadja IDG, Budiarta INP. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang : Setara Press.

Dirdjosisworo S. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

El Muhtaj M. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Kencana.

Kadarudin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci.

Maramis F. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres.

Pohan A, Santoso T, Moerings M. 2012. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Denpasar: Pustaka Larasan.

Prasetyo T. 2014. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Jurnal-jurnal dan penelitian lainnya :

Anshar, Abdulajid S. 2021. Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate). *Jurisprudentie*, 8 (1)

- Biaggy F, Wibowo P. 2020. Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3 (2)
- Dody Syukma R, Azed AB, Alamsyah B. 2022. Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14 (2)
- BPHN DEPKUMHAM. 2008. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)
- Fair H, Walmsley R. 2021. *World Prison Population List*, thirteenth edition. Institute for Criminal Policy Research, Birkbeck University of London
- Fitri W, Handayani V. 2021. Aspek Hukum Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Dalam Kondisi *Over Capacity* di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam pada Masa Covid-19. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4 (3).
- Hamja. 2022. Implikasi *Overcrowding* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Mimbar Hukum UGM*, 34 (1)
- Kusuma FP. 2013. Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive*, 2 (2)
- Kristianingsih SA. 2017. Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga) [tesis]. Yogyakarta (ID): Universitas Islam Indonesia.
- Ramadhani DR. 2020. Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak bagi Narapidana. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7 (1)
- Rusman. 2007. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Barru Ditinjau Dari Perspektif HAM [tesis]. Makassar (ID) : Unhas

Sianturi LLR, Wibowo P. 2022. Implementasi Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1)

Simatupang JTM, Padmono. 2022. Strategi Tata Bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan. *Jurnal Yustitia: Faculty of Law Universitas Wiralodra*.

Sirait DJN, Wibowo P. 2022. Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1)

Sugema JA. 2020. Penanganan Over Kapasitas di dalam Lapas. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7 (1)

Syatar A. 2018. Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 6 (1):118-134.

Usman, Nasution B J, Siregar E. 2020. Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Wajah Hukum Vol. 4 (2):436-444*.

Zulfa EA. 2005. Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica*, 3 (1).

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan :

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-02.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03
Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara
Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada
Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan,
Anak, dan Narapidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara

Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet :

Amira D.2022. Arti Implikasi: Pengertian Secara Umum dan Menurut Para Ahli, Beserta Jenis-jenisnya. Diakses pada 17 September 2023 dari <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-serta-jenis-jenisnya-575e2e.html>

Astuti NAR. 2019. RUU Pemasarakatan Disepakati, Ini 11 Poin Barunya. Diakses pada 18 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-4710513/ruu-pemasarakatan-disepakati-ini-11-poin-barunya>,

Auli RC. 2022. 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya. Diakses pada 18 Maret 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-1t62ff47f03be06>

Satu Data Indonesia. Kemenkumham. Diakses pada 01 Agustus 2023 dari <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>

Sistem *Database* Pemasarakatan. diakses pada 01 Agustus 2023 dari <http://103.130.139.42/sdp/Welcome>